



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 11A/LHP/XVIII.YOG/04/2023
Tanggal : 10 April 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244
Telepon (0274) 563635



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 11A/LHP/XVIII.YOG/042023

Tanggal : 10 April 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 588736

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran.....	1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	3
3. Laporan Operasional	4
4. Laporan Perubahan Ekuitas	6
5. Neraca	7
6. Laporan Arus Kas	9
7. Catatan atas Laporan Keuangan	11
Lampiran	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern

yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11b/LHP/XVIII.YOG/04/2023 tanggal 10 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 10 April 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta,



m, Widhi Widayat S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA *Wid*
Register Negara Akuntan No. 18933

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas Yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki 46 OPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO, LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak

yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 24 Januari s.d tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 12/ST/XVIII.YOG/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Pemeriksaan Terinci dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 27 Januari s.d. 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 40/ST/XVIII.YOG/02/2023 tanggal 24 Februari 2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Mr. vi *pe*



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Nomor : T/900.1.11/00002/Inspektorat Bantul, 10 April 2023
Lampiran : Kepada
Perihal : Surat Representasi Manajemen Yth. Ka. BPK RI Perwakilan DIY
Jl. HQS Cokroaminoto No.52, Yogyakarta
Di YOGYAKARTA

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami disajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan.





BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022; (c) Neraca tanggal 31 Desember 2022, (d) Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember 2022; (e) Laporan Arus Kas yang berakhir 31 Desember 2022, (f) Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir 31 Desember 2022; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022; sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 31 Desember 2022

ABDUL HALIM MUSLIH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	234.088.495.863,00	252.857.438.493,70	108,02	203.758.210.969,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.3	49.689.640.820,00	42.178.624.886,07	84,88	27.767.869.814,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4	23.707.166.955,00	20.839.915.416,20	87,91	20.053.389.569,97
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		213.368.704.758,00	224.696.444.576,83	105,31	240.091.353.675,13
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1				
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.2	30.626.145.000,00	36.764.154.907,00	120,04	43.031.166.560,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.5	903.288.932.566,00	902.030.732.566,00	99,86	911.168.107.000,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.6	99.798.175.000,00	77.408.558.243,00	77,57	73.224.278.336,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.326.054.480.490,00	1.309.437.261.781,00	98,75	1.254.511.869.549,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.3				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.4	58.566.684.000,00	58.566.684.000,00	-	30.323.619.000,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00		0,00
Dana Desa	5.1.1.2.2	101.247.697.000,00	101.247.697.000,00	100,00	109.399.072.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		159.814.381.000,00	159.814.381.000,00	100,00	139.722.691.000,00
Pendapatan Transfer - Antar Daerah					
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.3				
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	163.913.899.237,00	192.023.344.227,00	117,15	163.305.276.389,09
Jumlah Pendapatan Transfer - Antar Daerah		217.100.053.887,00	242.786.091.822,00	111,83	261.927.043.709,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.702.968.915.377,00	1.712.037.734.603,00	310,58	1.656.161.604.258,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.1.3				
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.1	6.000.000.000,00	6.725.000.000,00	112,08	6.167.255.751,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2		1.242.281.219,74		81.656.117.318,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		6.000.000.000,00	7.967.281.219,74	132,79	87.823.373.069,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.229.822.923.773,00	2.260.577.439.195,54	101,38	2.235.655.701.355,10
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.2.1				
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1	933.917.754.140,00	853.342.373.348,00	91,37	894.085.181.553,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.2	820.744.294.402,00	768.495.409.619,24	93,63	713.169.222.812,58
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00		0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	0,00	0,00		0,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	70.258.891.858,00	91.629.103.963,08	130,42	60.212.342.500,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.6	8.334.541.855,00	8.110.400.000,00	97,31	2.990.500.000,00
Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1.7	1.833.255.482.255,00	1.721.577.286.930,32	93,91	1.670.457.246.865,58
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	5.1.2.2				
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1	18.905.634.040,00	8.247.988.540,00	43,63	38.174.497.613,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2	71.125.955.338,00	70.206.003.149,45	98,71	70.145.840.914,94
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.3	56.709.358.999,00	37.780.797.101,00	66,62	43.667.937.716,16
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4	113.504.484.127,00	98.155.322.270,36	86,48	110.699.132.699,26
Belanja Aset Tidak Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	12.989.725.525,00	7.308.308.697,00	56,26	11.464.691.597,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00		42.546.454,00
JUMLAH BELANJA MODAL		273.235.158.029,00	221.698.419.757,81	81,14	274.194.646.994,36
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3				
Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	36.672.164.883,00	19.683.697.169,00	53,67	26.690.978.644,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		36.672.164.883,00	19.683.697.169,00	53,67	26.690.978.644,00
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan					
Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1				
Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.1.1	22.191.229.940,00	22.191.229.940,00	100,00	22.191.229.940,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.1.2	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00	100,00	3.912.168.310,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	100,00	26.103.398.250,00

Uraian	Reff	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.2				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	99.707.090,00	99.707.090,00	100,00	92.316.840,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	94.047.000.000,00	94.047.000.000,00	100,00	97.047.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	190.089.079.000,00	189.265.079.000,00	99,72	132.002.680.001,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		284.235.786.090,00	283.411.786.090,00	99,71	229.141.996.841,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.453.501.989.507,00	2.272.474.588.197,13	92,62	2.226.588.267.594,94
SURPLUS / (DEFISIT)		-223.679.065.734,00	-11.897.149.001,59	5,32	9.067.433.760,16
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4				
Penggunaan SILPA	5.1.4.1	240.503.861.658,00	240.503.861.658,33	100,00	238.201.393.766,17
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.1	0,00	0,00	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.4.1.2	14.675.204.076,00	18.362.654.076,00	125,13	3.746.925.000,00
Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.3	0,00	0,00		0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.1.4.1.4	0,00	0,00		0,00
Penerimaan Putang Daerah	5.1.4.1.5	0,00	0,00		
Penerimaan kembali investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.1.6	11.000.000.000,00	162.499.000,00	1,48	2.629.109.132,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		266.179.065.734,00	259.029.014.734,33	97,31	244.577.427.898,17
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00		0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00	100,00	12.341.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.4.2.3	0,00	0,00		0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	0,00	0,00		0,00
Pengeluaran Investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.2.5	11.000.000.000,00	0,00		800.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		42.500.000.000,00	31.500.000.000,00	74,12	13.141.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		223.679.065.734,00	227.529.014.734,33	101,72	231.436.427.898,17
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			215.631.865.732,74		240.503.861.658,33

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	240.503.861.658,33	238.201.393.766,17
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1	240.503.861.658,33	238.201.393.766,17
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.2.2	215.631.865.732,74	240.503.861.658,33
Sub Total		215.631.865.732,74	240.503.861.658,33
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.3	215.631.865.732,74	240.503.861.658,33

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
PENDAPATAN	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	261.630.329.239,01	214.146.710.466,20	47.483.618.772,81	22,17
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	41.979.230.670,07	28.476.234.231,00	13.502.996.439,07	47,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	37.689.050.611,78	25.359.043.410,39	12.330.007.201,38	48,62
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.1.1.4	212.860.629.115,90	258.771.986.796,13	-45.911.357.680,23	-17,74
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		554.159.239.636,76	526.753.974.903,72	27.405.264.733,03	5,20
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.4.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	40.996.827.969,00	43.031.166.560,00	-2.034.338.591,00	-4,73
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.3	902.030.732.566,00	911.168.107.000,00	-9.137.374.434,00	-1,00
Dana Alokasi khusus	5.4.1.2.1.4	77.408.558.243,00	73.224.278.336,00	4.184.279.907,00	5,71
Dana Alokasi khusus (non fisik)	5.4.1.2.1.5	293.233.816.065,00	227.088.317.653,00	66.145.498.412,00	29,13
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.313.669.934.843,00	1.254.511.869.549,00	59.158.065.294,00	4,72
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.4.1.2.2				
Dana Insentif Daerah		58.566.684.000,00	30.323.619.000,00	28.243.065.000,00	
Dana Desa	5.4.1.2.2	101.247.697.000,00	109.399.072.000,00	-8.151.375.000,00	-7,45
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		159.814.381.000,00	139.722.691.000,00	20.091.690.000,00	14,38
Jumlah Pendapatan Transfer - Antar Daerah	5.4.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.3	193.768.436.607,00	169.006.068.659,00	24.762.367.948,00	14,65
Bantuan Keuangan		50.762.747.595,00	98.621.767.320,00	-47.859.019.725,00	
Jumlah Pendapatan Transfer - Antar Daerah		244.531.184.202,00	267.627.835.979,00	-23.096.651.777,00	-8,63
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.718.015.500.045,00	1.661.862.396.528,00	56.153.103.517,00	3,38
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	6.725.000.000,00	87.823.373.069,00	-81.098.373.069,00	-92,34
Pendapatan Dana Darurat	5.4.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.3	7.491.560.123,74	47.477.075.042,79	-39.985.514.919,05	-84,22
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah		14.216.560.123,74	135.300.448.111,79	-121.083.887.988,05	-89,49
JUMLAH PENDAPATAN		2.286.391.299.805,50	2.323.916.819.543,51	-37.525.519.738,02	-1,61
BEBAN	5.4.2				
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	0,00			
Beban Pegawai-LO	5.4.2.1.1	853.528.493.948,00	894.087.809.376,00	-40.559.315.428,00	-4,54
Beban Barang dan jasa	5.4.2.1.2	745.158.212.049,70	718.283.705.870,78	26.874.506.178,92	0,00
Beban Bunga	5.4.2.1.3	0,00	0,00	0,00	
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	0,00	0,00	0,00	
Beban Hibah	5.4.2.1.5	91.860.271.963,96	60.212.342.500,00	31.647.929.463,96	52,56
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	8.110.400.000,00	2.990.500.000,00	5.119.900.000,00	171,21
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.7	79.694.250.246,73	111.309.038.020,30	-31.614.787.773,57	-39,63
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.1.8	31.559.543.026,25	30.970.162.486,36	589.380.539,89	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.4.2.1.9	93.269.677.458,83	99.459.281.955,76	-6.189.604.496,93	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.1.10	125.148.413,60	1.424.859.714,70	-1.299.711.301,10	-91,22
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.11	16.405.586.026,09	10.320.757.666,82	6.084.828.359,27	58,96
Beban Lain-lain	5.4.2.1.12		0,00	0,00	
JUMLAH BEBAN OPERASI		1.919.711.583.133,16	1.929.058.457.590,72	-9.346.874.457,56	1,15
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.2.1	22.191.229.940,00	22.191.229.940,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.2	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.2.3	99.707.090,00	92.316.840,00	7.390.250,00	
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.4	283.312.079.000,00	229.049.680.001,00	54.262.398.999,00	
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.5	0,00	0,00	0,00	
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	5.4.2.2.6	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH BEBAN TRANSFER		309.515.184.340,00	255.245.395.091,00	54.269.789.249,00	21,26
JUMLAH BEBAN		2.229.226.767.473,16	2.184.303.852.681,72	44.922.914.791,44	2,06
SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	57.164.532.332,34	139.612.966.861,79	-82.448.434.529,46	-59,05

Uraian	Reff	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.4	1.060.040.143,00	806.850.272,00	253.189.871,00	31,38
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional		1.060.040.143,00	806.850.272,00	253.189.871,00	31,38
BEBAN NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan Aset nonlancar	5.4.4	0,00	0,00	0,00	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	1.060.040.143,00	806.850.272,00	253.189.871,00	31,38
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	58.224.572.475,34	140.419.817.133,79	-82.195.244.658,46	-58,54
POS LUAR BIASA	5.4.5.1				
PENDAPATAN LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa	5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	5.4.5.1	19.683.697.169,00	12.624.382.752,00	7.059.314.417,00	55,92
Jumlah Beban Luar Biasa		19.683.697.169,00	12.624.382.752,00	7.059.314.417,00	55,92
POS LUAR BIASA	5.4.5.1	-19.683.697.169,00	-12.624.382.752,00	-7.059.314.417,00	55,92
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	5.4.5	38.540.875.306,34	127.795.434.381,79	-89.254.559.075,46	-69,84

*1) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.568.360.228.031,25	3.443.741.268.211,12
Surplus/Defisit - LO	5.6.2	38.540.875.306,34	127.795.434.381,79
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3	(66.938.339.395,93)	(3.176.474.561,66)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.539.962.763.941,66	3.568.360.228.031,25

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	215.631.865.732,74	240.503.861.658,33
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	186.937.014.179,24	193.368.116.811,73
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	39.974,00	64.990.196,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	212.692.566,00	111.276.500,00
Kas di Pengelola Dana Bergulir	5.3.1.1.1.4	20.000,00	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.1.5	28.290.251.443,50	45.745.324.646,60
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.6	191.847.570,00	1.214.153.504,00
	5.3.1.1.1.7		
Piutang	5.3.1.1.2	67.184.652.222,59	89.811.088.207,77
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	149.648.052.721,50	140.875.161.976,19
Piutang Retribusi		1.737.998.367,85	1.937.392.583,85
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan		-	-
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		63.839.339.439,94	74.501.657.507,87
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.2.1.2	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah		1.745.092.380,00	5.709.166.800,47
Piutang Lainnya		10.707.993.879,00	10.875.947.879,00
Penvisihan Piutang		(160.493.824.565,70)	(144.088.238.539,61)
Beban Dibayar dimuka	5.3.1.1.6	552.101.334,28	657.111.322,31
Persediaan	5.3.1.1.7	45.732.797.735,02	60.367.722.354,00
JUMLAH ASET LANCAR		329.101.417.024,63	391.339.783.542,41
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	-	-
Penvisihan Investasi Non Permanen	5.3.1.2.2	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
Investasi Permanen			
Investasi Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.3	219.587.929.796,59	203.992.913.215,88
Investasi Permanen Lainnya		180.180.711.776,12	175.962.819.034,35
Jumlah Investasi Permanen		399.768.641.572,71	379.955.732.250,23
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		399.768.641.572,71	379.955.732.250,23
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	580.066.622.548,00	574.701.276.878,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.000.913.175.629,20	944.028.237.113,99
Bangunan dan Gedung	5.3.1.3.3	1.439.781.255.131,43	1.394.672.601.555,26
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.675.892.391.386,40	2.574.516.256.456,05
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	82.030.386.109,96	79.576.885.504,48
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	-	-
Akumulasi Penvusutan	5.3.1.3.7	(2.935.596.538.815,85)	(2.731.082.314.804,04)
JUMLAH ASET TETAP		2.843.087.291.989,14	2.836.412.942.703,74
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4		
Dana Cadangan		-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tambahan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1	-	-

Uraian	Reff	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-
Utang Bunga	5.3.2.1.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka panjang	5.3.2.1.3	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	932.423.864,37	1.362.983.135,40
Utang Belanja	5.3.2.1.5	45.045.037.924,87	48.749.001.437,76
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		45.977.461.789,24	50.111.984.573,16
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	5.3.2.2.1	-	-
Utang Dalam Negeri-Obligasi	5.3.2.2.2	-	-
Premium (diskonto) obligasi	5.3.2.2.3	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.4	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		45.977.461.789,24	50.111.984.573,16
EKUITAS	5.3.3		
Ekuitas	5.3.3	3.539.962.763.941,66	3.568.360.228.031,25
JUMLAH EKUITAS		3.539.962.763.941,66	3.568.360.228.031,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.585.940.225.730,90	3.618.472.212.604,41

* Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Metode Langsung

Uraian	Reff	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas:	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	252.857.438.493,70	203.758.210.969,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1	42.178.624.886,07	27.767.869.814,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	20.839.915.416,20	20.053.289.569,97
Penerimaan Lain – Lain PAD yang Sah	5.5.1.1	223.636.404.433,83	239.284.503.403,13
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1	36.764.154.907,00	43.031.166.560,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	902.030.732.566,00	911.168.107.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	5.5.1.1	77.408.558.243,00	73.224.278.336,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.5.1.1	293.233.816.065,00	227.088.317.653,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1	58.566.684.000,00	30.323.619.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1	-	-
Penerimaan Dana Keistimewaan	5.5.1.1	-	-
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1	101.247.697.000,00	109.399.072.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1	192.023.344.227,00	163.305.276.389,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1	50.762.747.595,00	98.621.767.320,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1	6.725.000.000,00	6.167.255.751,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1	1.242.281.219,74	81.656.117.318,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.259.517.399.052,54	2.234.848.851.083,10
Arus Keluar Kas:	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	853.342.373.348,00	894.085.181.553,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2	768.495.409.619,24	632.075.847.649,99
Pembayaran Bunga	5.5.1.2	-	-
Pembayaran Hibah	5.5.1.2	91.629.103.963,08	80.544.557.499,89
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2	8.110.400.000,00	2.990.500.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota/Pemerintah Desa	5.5.1.2	283.411.786.090,00	229.141.996.841,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	19.683.697.169,00	26.690.978.644,00
Pembayaran Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	5.5.1.3	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.4	-	-
Pembayaran dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1.2	2.050.776.168.439,32	1.891.632.460.437,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	208.741.230.613,22	343.216.390.645,22
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non	5.5.2		
Arus Masuk Kas:	5.5.2.1		
Penerimaan Dana Cadangan	5.5.2.1	-	-
Penerimaan atas Tanah	5.5.2.1	-	-
Penerimaan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	955.040.143,00	629.490.272,00
Penerimaan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1	105.000.000,00	154.000.000,00
Penerimaan atas Jalan, irigasi dan jaringan	5.5.2.1	-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1	-	-
Penerimaan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1	-	23.360.000,00
Saldo Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.5.2.1	18.362.654.076,00	3.746.925.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		19.422.694.219,00	4.553.775.272,00
Arus Keluar Kas:	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2	-	-
Pembelian Tanah	5.5.2.2	8.247.988.540,00	38.174.497.613,00
Pembelian Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	70.206.003.149,45	70.145.840.914,94
Pembelian Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	37.780.797.101,00	43.667.937.716,16
Pembelian Jalan, Irigasi an Jaringan	5.5.2.2	98.155.322.270,36	110.699.132.699,26
Pembelian Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	7.308.308.697,00	11.464.691.597,00
Pembelian Aset Lainnya	5.5.2.2	-	42.546.454,00
Pembentukan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	31.500.000.000,00	12.341.000.000,00
Pembentukan Pembelian Investasi non Permanen	5.5.2.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		253.198.419.757,81	286.535.646.994,36
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non	5.5.2.3	(233.775.725.538,81)	(281.981.871.722,36)

Uraian	Reff	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas:	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.5.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	5.5.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya (dana bergulir)	5.5.3.1	162.499.000,00	2.629.109.132,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah	5.5.3.1	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		162.499.000,00	2.629.109.132,00
Arus Keluar Kas:	5.5.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga keuangan Bank	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	5.5.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.5.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	5.5.3.2	-	800.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		-	800.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.3	162.499.000,00	1.829.109.132,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
Arus Masuk Kas:	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.1	120.650.633.324,00	74.064.124.325,18
Penerimaan Penyctoran Sisa UP	5.5.4.1	4.750.585.146,80	4.499.310.865,00
Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil atas penggunaan Uang Persediaan		14.536.203.903,20	10.738.426.260,00
Jumlah Arus Masuk Kas		139.937.422.374,00	89.301.861.450,18
Arus Keluar Kas:	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga	5.5.4.2	120.650.633.324,00	74.064.124.325,18
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.2	19.286.789.050,00	15.237.737.125,00
Jumlah Arus Keluar Kas		139.937.422.374,00	89.301.861.450,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4.3	-	-
Rekonsiliasi Penurunan Kas	5.5.5	(24.871.995.925,59)	63.063.628.054,86
Saldo Awal Kas (BUD dan BLUD)	5.5.6	240.503.861.658,33	234.211.742.886,54
Saldo Akhir Kas (BUD dan BLUD)	5.5.6	215.227.265.622,74	239.113.441.458,33
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	39.974,00	64.990.196,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6	212.692.566,00	111.276.500,00
Kas di Dana Bergulir	5.5.6	20.000,00	-
Kas di BOS	5.5.6	-	-
Kas di Block Grand	5.5.6	191.847.570,00	1.214.153.504,00
Saldo Akhir Kas - Neraca		215.631.865.732,74	240.503.861.658,33

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

